



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI
MENGENAI
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"

MENGINGAT hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin di antara kedua negara dalam berbagai bidang;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama yang telah terjalin melalui kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, keadilan dan keterbukaan;

BERMAKSUD untuk menjaga perlindungan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan pemberi kerjanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, dan menjaga kedaulatan kedua negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak dalam Persetujuan adalah:

Pihak Pertama : Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakili oleh
Kementerian Tenaga Kerja

Pihak Kedua : Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 1

Persetujuan ini bertujuan untuk membentuk suatu mekanisme efektif untuk penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik, memastikan perlindungan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan majikannya, dan menetapkan standar perjanjian kerja sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Para Pihak wajib:

- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang juga termasuk norma-norma internasional, untuk menjamin perlindungan yang efektif dan setara terhadap hak tenaga kerja sektor domestik dan para pemberi kerjanya, termasuk hak untuk memperoleh upaya hukum yang efektif yang ada dalam sistem hukum mereka guna perlindungan hak-hak yang dimaksud;
- b. bekerjasama melalui dialog dan konsultasi melalui jalur diplomatik dalam menentukan semua isu terkait pelaksanaan Persetujuan ini;
- c. memastikan semua perekrutan tenaga kerja Indonesia sektor domestik dilakukan oleh kantor-kantor perekrutan, perusahaan-perusahaan atau agensi-agensi yang memiliki izin;

- d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kantor-kantor perekrutan, perusahaan-perusahaan, atau agensi-agensi yang memiliki izin mematuhi hukum dan peraturan perundangan-undangan domestik yang berlaku terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik di Arab Saudi;
- e. berupaya untuk mengendalikan biaya perekrutan di kedua negara;
- f. berupaya untuk mengembangkan suatu manajemen penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik yang memadai, termasuk pengembangan sistem perekrutan dan penempatan secara *online*;
- g. mengembangkan pedoman tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sektor domestik, yang mengatur kewajiban tenaga kerja sektor domestik, majikannya dan kantor-kantor perekrutan, perusahaan-perusahaan, dan agensi-agensi yang memiliki izin.
- h. menetapkan suatu standar kontrak kerja untuk tenaga kerja sektor domestik, yang mana teksnya telah diakui oleh institusi yang berwenang kedua negara, yang mengikat para pihak yang berkontrak (majikan, tenaga kerja sektor domestik, Kantor Perekrutan Saudi dan Agensi Perekrutan Indonesia);
- i. sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di kedua negara, mensyaratkan bahwa kontrak kerja memuat setidaknya klausul-klausul sebagai berikut:
 - (1). jenis pekerjaan dan waktu kerja
 - (2). tempat kerja
 - (3). tugas dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja
 - (4). gaji dan pembayarannya
 - (5). libur dan cuti
 - (6). jangka waktu, perpanjangan, dan pengakhiran kontrak

Geji

RK

Pasal 3

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Pertama wajib:

- a. mengawasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan dari semua ketentuan yang ada dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja sektor domestik;
- b. memastikan pemenuhan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik untuk memegang sendiri dokumen perjalanannya, dokumen identitas atau dokumen pribadi lainnya dalam keadaan apapun kecuali dalam hal penyitaan yang telah diperintahkan oleh pengadilan Arab Saudi, dan bebas berkomunikasi dengan keluarga mereka;
- c. menerbitkan kartu identitas yang sah setelah kedatangan seorang tenaga kerja Indonesia sektor domestik sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berupaya untuk mensyaratkan para majikan menyediakan suatu skema asuransi dalam rangka melindungi hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan kepentingan pemberi kerjanya;
- e. memfasilitasi pembukaan suatu rekening bank oleh majikan atas nama tenaga kerja Indonesia sektor domestik untuk menyimpan pendapatannya seperti telah ditentukan dalam kontrak kerja;
- f. berupaya untuk membentuk suatu mekanisme yang akan menyediakan bantuan 24 jam untuk tenaga kerja Indonesia sektor domestik;

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

- g. memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan bantuan kekonsuleran yang diberikan oleh misi diplomatik atau konsuler Indonesia, dengan memberikan informasi tentang tenaga kerja Indonesia sektor domestik yang ditangkap atau dipenjara atau ditahan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memfasilitasi repatriasi tenaga kerja Indonesia sektor domestik dalam penyelesaian kontrak, keadaan darurat atau sesuai dengan kebutuhan, termasuk penerbitan visa keluar.

Pasal 4

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Kedua wajib:

- a. mensyaratkan bahwa calon tenaga kerja Indonesia sektor domestik berumur antara 21-55 tahun;
- b. memastikan bahwa calon tenaga kerja Indonesia sektor domestik tidak memiliki catatan kriminal;
- c. menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sektor domestik dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak kerja, dan pengetahuan tentang budaya, adat istiadat dan praktik sosial di Arab Saudi;
- d. memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia sektor domestik memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Arab Saudi;
- e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi transportasi dari para tenaga kerja yang prospektif menuju Kerajaan dalam waktu tidak melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal penerimaan visa oleh agensi perekrutan di Indonesia.



Pasal 5

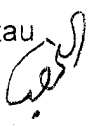
1. Suatu kontrak kerja antara seorang tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan majikannya hanya berlaku bila kontrak kerja tersebut dibuat dalam bahasa yang dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berkontrak dan dapat diverifikasi oleh Pihak lain.
2. Para Pihak dalam masing-masing kewenangannya wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan penuh ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja. Untuk tujuan itu, kedua Pihak menyediakan bantuan hukum yang efektif untuk tenaga kerja Indonesia sektor domestik maupun pemberi kerja jika terjadi pelanggaran kontrak kerja, termasuk untuk melindungi hak setiap pihak untuk menuntut kompensasi.
3. Para Pihak wajib melakukan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul antara seorang tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan pemberi kerjanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Arab Saudi.

Pasal 6

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Komite Kerja Bersama terdiri dari pejabat yang terkait dari masing-masing Pihak untuk membahas setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Komite Kerja Bersama wajib bertemu dari waktu ke waktu dan menentukan tempat dan tanggal pertemuan tersebut.

Pasal 7

Setiap sengketa yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.



Pasal 8

1. Setiap Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis melalui jalur diplomatik tentang pemenuhan prosedur konstitusionalnya guna pemberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir.
2. Persetujuan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk periode yang sama kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa perjanjiannya.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
4. Meskipun Persetujuan ini berakhir, ketentuannya wajib tetap berlaku terkait dengan kontrak kerja yang dibuat saat Persetujuan ini masih berlaku. Pengakhiran Persetujuan ini tidak mempengaruhi pelaksanaan program-program dan proyek-proyek yang sedang berjalan dibawah Persetujuan ini, kecuali disepakati lain secara bersama oleh para Pihak.

Pasal 9

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi dengan kesepakatan bersama di antara para Pihak. Amandemen atau revisi tersebut wajib berlaku sesuai dengan pasal 8 paragraf 1

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani persetujuan ini.



DIBUAT rangkap dua , di Riyadh pada tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Persetujuan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

ATAS NAMA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



Muhaimin Iskandar
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

ATAS NAMA PEMERINTAH
KERAJAAN ARAB SAUDI



Adel M. Fakeih
Menteri Tenaga Kerja



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
ON
THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC
WORKERS**

The Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of Manpower and Transmigration and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia represented by the Ministry of Labor hereinafter referred to singularly as the "Party" and collectively as "the Parties".

TAKING INTO ACCOUNT cordial ties and existing cooperation between both countries in various fields;

DESIRING to promote the existing cooperation through cooperation in the field of labor based on principles of mutual benefits, mutual respect, fairness and transparency;

INTENDING to secure the protection of the rights of both Indonesian domestic workers and their employers in accordance with respective applicable laws and regulations of both countries, and to maintain sovereignty of both countries;

Have agreed as follows:

CS

RA

Parties to the Agreement are:

First Party : The Government of the Kingdom of Saudi Arabia
represented by the Ministry of Labor

Second Party : The Government of the Republic of Indonesia
represented by the Ministry of Manpower and
Transmigration

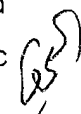
Article 1

This Agreement shall aim at establishing an effective mechanism for placement of Indonesian domestic workers, ensuring the protection of the rights of both Indonesian domestic workers and their employers, and setting standard of employment contract in accordance with their respective applicable laws and regulations.

Article 2

The Parties shall:

- a. take all necessary measures, in a manner prescribed by their respective applicable laws and regulations, which may include international norms, to ensure effective and equal protection of the rights of domestic workers and their employers, including the rights to have effective legal remedies as available to their legal system for the protection of such rights;
- b. cooperate through dialogue and consultation through diplomatic channel in addressing all issues relating to the implementation of this Agreement;
- c. ensure that all recruitments of Indonesian domestic workers be carried out by licensed recruitment offices, companies or agencies;
- d. Take all necessary measures to ensure compliance of the licensed recruitment offices, companies or agencies to their applicable domestic



laws and regulations with respect to placement of the Indonesian domestic workers in Saudi Arabia;

- e. endeavor to control recruitment costs in both countries;
- f. endeavor to develop a robust management of placement of Indonesian domestic workers, including development of online recruitment and placement system;
- g. develop guidelines for placement and protection of Indonesian domestic workers, setting out responsibilities of domestic workers, employers and licensed recruitment offices, companies and agencies;
- h. Adopt a standard employment contract for domestic workers, the text of which shall have been accepted by the competent authorities of the two countries, which shall be binding among the contracting parties (Employer, Domestic Worker, Saudi Recruitment Offices and Indonesia Recruitment Agencies);
- i. In accordance with the prevailing laws and regulations of both countries, require that the employment contract include at least the following clauses:
 - (1). type of work and working time
 - (2). place of work
 - (3). duties and responsibilities of the employer and the worker
 - (4). wage and its payment
 - (5). day off and leave
 - (6). duration, extension and termination of contract

Article 3

In accordance with its applicable laws and regulations, the First Party shall:



- a. Supervise and take all necessary measures with a view to ensuring the implementation of all the terms of employment contract between the employer and the domestic worker;
- b. ensure the fulfillment of the right of Indonesian domestic workers to hold their own travel document, identification document or any other personal documents in any circumstance except in confiscation as authorized by court of Saudi Arabia, and to communicate freely with their families;
- c. issue a valid identity card after the arrival of an Indonesian domestic worker in accordance with its applicable laws and regulations;
- d. endeavor to require employers to provide an insurance scheme with a view to protecting the right of Indonesian domestic workers and the interest of their employer;
- e. facilitate the opening of a bank account by the employer under the name of an Indonesian domestic workers for depositing his / her income as provided in the employment contract;
- f. endeavor to establish a mechanism which will provide 24 hour assistance available to the Indonesia domestic workers;
- g. Facilitate the exercise of consular protection and assistance rendered by Indonesian diplomatic or consular missions, by providing information about any Indonesian domestic workers arrested or imprisoned or detained as per the applied laws and regulations;
- h. Facilitate the repatriation of domestic workers upon contract completion, emergency situations or as the need arises, including the issuance of exit visas.

CAJ

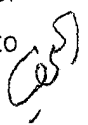
RK

Article 4

In accordance with its applicable laws and regulations, the Second Party shall:

- a. require that prospective Indonesian domestic workers between 21 - 55 years of age;
- b. ensure that the prospective recruited Indonesian domestic workers have no criminal record;
- c. provide training to Indonesian domestic workers on specific skills as required in the employment contract, and knowledge on culture, customs and social practices in Saudi Arabia;
- d. ensure that Indonesian domestic workers satisfy health requirement as determined by Saudi Arabia;
- e. Take necessary action towards facilitating transport of prospective workers to the Kingdom within a period not exceeding 1 (one) month from the date of receipt of visa by the recruitment agencies in Indonesia.

Article 5

1. An employment contract between an Indonesian domestic worker and her / his employer shall be valid only when it is formulated in understandable languages and agreed by both parties to the contract and may be verified by any Party.
 2. The Parties within their respective competences shall take any necessary measures to ensure full implementation of the terms of the employment contract. For that purpose, both Parties undertake to provide effective legal remedies for both Indonesian domestic workers or employers in the event of breach of employment contract, including to secure the right of any party to claim compensation.
- 
- 

3. The Parties shall exert its best endeavor to settle any dispute arising between an Indonesian domestic workers and her / his employer in accordance with the law of Saudi Arabia.

Article 6

1. The parties agree to establish a Joint Working Committee comprising relevant officials from respective Parties to discuss any matter arising from the implementation of this Agreement.
2. The Joint Working Committee shall meet from time to time and designate the venue and the date of the meeting.

Article 7

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article 8

1. Each Party shall notify the either Party in writing through diplomatic channels of completion of its constitutional procedures for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall be effective as of the date of the later notification.
2. This agreement shall be in force for a period of 3 (three) years and automatically renewable for the same periods unless either party notify in writing its intention to terminate this agreement 2 (two) months prior to its expiration.
3. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving written notification to the other Party 6 (six) months in advance of the intended date of termination.

657

RT

4. Notwithstanding the termination of this Agreement, its provision shall remain in force with regard to employment contracts concluded during the validity of this Agreement. The termination of this Agreement shall not affect the completion of ongoing programs of projects under this Agreement, unless jointly decided otherwise by the Parties.

Article 9

The Agreement may be amended or revised by mutual consent between the Parties. Such amendment or revision shall come into force pursuant to the Article 8 paragraph 1.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate, in Riyadh on the 19th of February 2014, in Indonesian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF

THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



Muhaimin Iskandar
Minister for Manpower and
Transmigration

ON BEHALF OF

THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



Adel M. Fakeih
Minister of Labor



REPUBLIK INDONESIA

اتفاق

بين حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية

يشار إلى حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين". اعتباراً للعلاقات الودية والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات؛ ورغبة في تعزيز التعاون القائم من خلال التعاون في المجالات العمالية واستناداً إلى مبادئ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والعدالة والشفافية؛ ورغبة في ضمان وحماية حقوق كل من العمالة المنزلية الاندونيسية وأصحاب العمل وفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين وبما يتماشى مع سيادة البلدين؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

طرفا الاتفاق هما:

الطرف الأول: حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل.
الطرف الثاني: حكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة.

المادة (١):

يهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء آلية فعالة لتوظيف العمالة المنزلية الاندونيسية وضمان حماية حقوق كل من العمالة المنزلية الاندونيسية وأصحاب العمل ووضع معايير لعقد العمل وفقاً لقوانينهما ولوائحهما السارية.

المعتمد

RT

المادة (٢):

يلتزم الطرفان بـ:

- أ- اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية ومخدوميهم بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق.
- ب- التعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق؛
- ج- ضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية بواسطة مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام مرخص لها؛
- د- اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب و شركات و وكالات الاستقدام المرخص لها بقوانينهما ولوائحهما المحلية السارية فيما يتعلق بتوظيف العمالة المنزلية الاندونيسية في المملكة العربية السعودية؛
- هـ- السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين ؛
- و- السعي لتطوير إدارة قوية لتوظيف العمالة المنزلية الاندونيسية بما في ذلك تطوير نظام الكتروني للاستقدام والتوظيف ؛
- ز- وضع إرشادات لتوظيف وحماية العمالة المنزلية الاندونيسية وتحديد مسؤوليات العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها.
- ح- اعتماد عقد توظيف موحد للعمالة المنزلية تقبل بنصه السلطات المختصة في البلدين ويكون ملزماً للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل والعامل المنزلي ومكاتب الاستقدام السعودية ووكالات الاستقدام الإندونيسية)؛
- ط- أن يتضمن عقد العمل الفقرات التالية وفقاً للقوانين واللوائح السائدة في كلا البلدين:

(١) نوع ووقت العمل.

(٢) مكان العمل.

المكتب

AT

(٣) واجبات ومسئوليات صاحب العمل والعامل.

(٤) الأجر.

(٥) يوم الراحة الأسبوعية والإجازة.

(٦) مدة وتمديد وإنهاء العقد.

المادة (٣):

على الطرف الأول القيام بما يلي وفقا لقوانينه ولوائحه السارية:

- أ- الإشراف واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تنفيذ كل شروط عقد العمل بين صاحب العمل والعاملة المنزلية.
- ب- ضمان الوفاء بحق العمالة المنزلية الاندونيسية في حمل وثائق السفر الخاصة بهم أو وثيقة الهوية أو أي وثائق شخصية أخرى في أي ظرف باستثناء المصادرة المصرح بها من الجهات القضائية في المملكة وفي الاتصال بحرية بعائلاتهم؛
- ج- إصدار بطاقة هوية سارية بعد وصول العامل المنزلي الإندونيسي وفقا لقوانينه ولوائحه السارية؛
- د- السعي لإلزام أصحاب العمل بتوفير نظام تأمين يهدف لحماية حق العمالة المنزلية الاندونيسية ومصلحة صاحب العمل؛
- هـ- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل/العاملة المنزلية الإندونيسي لإيداع دخله/ دخلها كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
- و- السعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة المتاحة خلال اربعة وعشرون ساعة.
- ز- تسهيل ممارسة المساعدة القنصلية المقدمة من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإندونيسية للمواطنين الإندونيسيين بتقديم معلومات عن أي عامل منزلي إندونيسي يتم اعتقاله أو سجنه أو حجزه وفقا للقوانين واللوائح السارية.
- ح- تسهيل إعادة العمالة المنزلية الاندونيسية عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو عند ظهور حاجة لذلك بما في ذلك إصدار تأشيرات الخروج.

المعتمد

RT

المادة (٤):

على الطرف الثاني القيام بما يلي وفقاً للقوانين واللوائح السارية:

- أ- اشتراط أن يكون سن العمالة المنزلية الاندونيسية المرشحة للعمل بين ٢١- ٥٥ سنة؛
- ب- ضمان ألا تكون العمالة المنزلية الاندونيسية المرشحة للعمل ذات سوابق جنائية؛
- ج- توفير التدريب للعمالة المنزلية الاندونيسية في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل و تعريفهم بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في المملكة العربية السعودية؛
- د- ضمان وفاء العمالة المنزلية الاندونيسية بالشروط الصحية التي تحددها المملكة العربية السعودية؛
- هـ- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل ارسال العمال المحتملين إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة بواسطة وكالات الاستقدام في إندونيسيا.

المادة (٥):

- ١- يكون عقد العمل بين أي عامل/عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل سارياً فقط في حال صياغته بلغات مفهومة ومتفق عليه من طرفي العقد ويمكن التحقق منه بواسطة أي طرف.
- ٢- على الطرفين اتخاذ أي تدابير ضرورية في حدود صلاحياتهما لضمان التنفيذ الكامل لشروط عقد العمل. ولذلك الغرض يتعهد الطرفان معا بتوفير وسائل الانتصاف القانونية الفعالة لكل من العمالة المنزلية الاندونيسية أو أصحاب العمل في حال خرق عقد العمل بما في ذلك إعطاء الحق لأي طرف في طلب التعويض.

المرعى

١٤

٣- على الطرفين بذل قصارى جهودهما لتسوية أي نزاع ينشأ بين أي عامل/عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل طبقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.

المادة (٦):

- ١- يتعهد الطرفان بإنشاء لجنة فنية مشتركة تضم المسؤولين ذوي الصلة من الطرفين لمناقشة أي أمر ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق.
- ٢- تقوم اللجنة الفنية المشتركة بالاجتماع من وقت لآخر وتحدد اماكن وتواريخ الاجتماعات.

المادة (٧):

أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته ودياً عبر المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

المادة (٨):

- ١- على كل طرف إشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال إجراءاته النظامية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويسري هذا الاتفاق من تاريخ الإخطار لاحقاً.
- ٢- يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يُخطر أي من الطرفين الآخر كتابة بنيته في إنهاء هذا الاتفاق قبل شهرين من انتهائها.
- ٣- يجوز لأي طرف إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ الذي ينوي إنهاؤها فيه.
- ٤- في حال إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه سارية فيما يتعلق بعقود العمل المبرمة أثناء سريانه. ولا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على إكمال البرامج الناشئة بموجب هذا الاتفاق ما لم يقرر الطرفان معاً غير ذلك.

الموافق

١٤

المادة (٩):

يجوز تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه باتفاق الطرفين معا. ويسري التعديل أو التنقيح طبقا للمادة ٨ الفقرة ١.

و على ضوء ذلك فقد وقع على هذا الاتفاق الموقعون أدناه و المفوضون رسميا بالتوقيع من قبل حكوماتهم.

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين في مدينة الرياض بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٩م باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية وكل النصوص متساوية في الحجية. وفي حال أي اختلاف في تفسير هذا الاتفاق فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

المعتمدين

عن حكومة جمهورية اندونيسيا

عن حكومة المملكة العربية السعودية

مهيمن اسكندر

وزير القوى العاملة والهجرة

عادل بن محمد فقيه

وزير العمل